

Analisis Strategis Keanggotaan Indonesia dalam BRICS terhadap Migrasi dan Proteksionisme Tenaga Kerja: Tinjauan Ekonomi Politik Migrasi

**Dewi Fortuna Sari
Walda Okvi Juliana Ningsih**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Indonesia

e-mail: dewifortuna.fisip@upnjatim.ac.id
waldaokvi.fisip@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

Indonesia's membership in BRICS can create various opportunities and challenges in global economic integration that affect national migration and labor protectionism policies. This study aims to analyze the role of BRICS in the direction of global labor policy and its impact on Indonesian labor policy, especially on worker protection and labor mobility. Through a descriptive qualitative approach with the theoretical framework of Political Economy of Migration from Geddes and Scholten (2016), this study analyzes the interaction between national political interests and global pressures in the conceptualization of labor policy. The results of this study indicate that BRICS is used as an alternative platform for Indonesia to meet the needs of global integration, especially related to employment that is more appropriate to the context of developing countries. For Indonesia, BRICS membership provides a strategic opportunity considering its current bargaining position in labor diplomacy, BRICS membership will open a path that allows the formation of policies that adapt to changes in the global labor market and Indonesia's domestic resources.

Keywords: Indonesia, BRICS, Employment, Political Economy

ABSTRAK

Keanggotaan Indonesia dalam BRICS dapat menciptakan berbagai peluang dan tantangan yang berbeda dalam integrasi ekonomi global yang berpengaruh terhadap migrasi nasional dan kebijakan proteksionisme tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BRICS dalam arah kebijakan ketenagakerjaan global dan dampaknya terhadap kebijakan ketenagakerjaan Indonesia, khususnya pada perlindungan pekerja dan mobilitas tenaga kerja. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka teori Political Economy of Migration dari Geddes dan Scholten (2016), penelitian ini menganalisis interaksi antara kepentingan politik nasional dan tekanan global dalam konseptualisasi kebijakan ketenagakerjaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BRICS digunakan sebagai platform alternatif bagi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan integrasi global khususnya terkait ketenagakerjaan yang lebih sesuai dengan konteks negara berkembang. Bagi Indonesia, keanggotaan BRICS memberikan peluang yang strategis mengingat posisi tawarnya saat ini dalam diplomasi ketenagakerjaan, keanggotaan BRICS akan membuka jalur yang memungkinkan terbentuknya kebijakan yang beradaptasi dengan perubahan di pasar tenaga kerja global dan sumber daya domestik Indonesia.

Kata Kunci: Indonesia, BRICS, Ketenagakerjaan, Ekonomi Politik

Pendahuluan

BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) adalah kelompok ekonomi yang memiliki pengaruh besar dalam ekonomi global. Dibentuk pada tahun 2009, BRICS menjadi sebuah koalisi ekonomi negara-negara berkembang yang didasarkan pada solidaritas dan tujuan bersama yakni membentuk kembali tata kelola global dan mengimbangi dominasi lembaga-lembaga yang dipimpin Barat. Dalam perjalanannya, dengan total populasi lebih dari 40% penduduk dunia dan kontribusi terhadap sepertiga Produk Domestik Bruto (PDB) global,

Analisis Strategis Keanggotaan Indonesia dalam BRICS terhadap Migrasi dan Proteksionisme Tenaga Kerja: Tinjauan Ekonomi Politik Migrasi

BRICS menjadi kekuatan ekonomi alternatif terhadap negara-negara maju. Indonesia telah menunjukkan minat untuk bergabung dengan BRICS, terutama setelah adanya perluasan keanggotaan pada KTT BRICS 2023. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, keanggotaan Indonesia dalam BRICS dipandang sebagai strategi untuk memperluas pasar perdagangan dan investasi, termasuk di sektor tenaga kerja.

BRICS menekankan pada kerja sama Selatan-selatan dengan menawarkan potensi jalur alternatif dalam kebijakan pembangunan. Dalam *Framework of operational guidelines on United Nations support to South-South and triangular cooperation* (2016), pendekatan *South-South cooperation* atau kerja sama Selatan-selatan merupakan proses kerja sama yang melibatkan pertukaran pengetahuan, keterampilan, sumber daya, serta keahlian teknis, dan dilakukan melalui aksi kolektif di tingkat regional maupun antar kawasan. Kemitraan ini dapat melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, organisasi regional, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta. Dalam konteks penelitian ini, negara-negara BRICS telah menghadapi tantangan yang sama terkait migrasi termasuk potensi kesesuaian tinggi dalam pasar tenaga kerja mereka. Arus masuk migran dari negara-negara tetangga dapat menjadi sarana penting untuk menstabilkan kondisi ekonomi di kawasan perbatasan mereka. Migrasi juga berfungsi sebagai alat *soft diplomacy* atau *soft power* yang strategis, dimana negara penerima dapat membentuk para migran sebagai agen yang membawa pengaruh ekonomi, politik, dan budaya negara tersebut ke negara asalnya, misalnya melalui pendidikan, pelatihan, dan pembentukan nilai (Korobkov, 2015). Oleh karena itu, kebijakan migrasi tenaga kerja menjadi sangat signifikan.

Indonesia dapat bergabung dengan BRICS, memiliki tujuan salah satunya untuk meningkatkan kerja sama ekonomi Selatan-Selatan dan sumber alternatif investasi serta bantuan pembangunan. Ampri (2024) menyampaikan bahwa Indonesia memandang BRICS sebagai platform potensial untuk pendanaan pembangunan, dan ini akan mencakup Bank Pembangunan Baru (NDB) yang baru-baru ini dibentuk oleh BRICS. Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dan memperkuat sebagai anggota BRICS karena secara demografi, sumber daya alam, dan stabilitas politik. Dengan lebih dari 270 juta penduduk, sebagai negara dengan pasar internal yang cukup besar, Indonesia juga memiliki tenaga kerja muda yang substansial sebagai sumber daya yang berguna. Menurut laporan McKinsey (2023), perluasan kelas menengah Indonesia telah banyak mendorong pertumbuhan konsumsi domestik di Asia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis yang sangat menarik bagi negara-negara BRICS lainnya, terlebih lagi dalam membangun ketahanan rantai pasokan global.

Dari perspektif geopolitik, keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga memiliki dimensi strategis yang penting. Menurut *The Diplomat* (2025), Indonesia mampu memainkan peran sebagai "*swing state*" di tengah kompetisi antara kekuatan besar dunia, khususnya Amerika Serikat dan Tiongkok. Meskipun tergabung dalam BRICS, Indonesia tetap mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif, sehingga tidak serta-merta berpihak pada blok tertentu. Ini memberikan fleksibilitas diplomatik bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawar baik di forum BRICS maupun di berbagai perjanjian perdagangan bebas multilateral dan regional lainnya, seperti *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity* (IPEF) atau *Association of Southeast Asia Nation* (ASEAN). Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia di BRICS berpotensi memperkuat profil diplomatik Indonesia di tingkat global.

Dari sudut pandang ekonomi makro, keanggotaan Indonesia dengan BRICS menunjukkan peluang baru untuk diversifikasi investasi perdagangan. Menurut ASEAN *Briefing* (2025), BRICS menyumbang 28% dari PDB dunia; karenanya, merupakan kekuatan signifikan dalam sistem ekonomi dunia dan memiliki potensi ukuran pasar. Melalui BRICS, Indonesia dapat meningkatkan ekspor komoditas primer dan upaya industrialisasi dengan penggunaan teknologi baru seperti energi baru dan terbarukan serta digitalisasi. Rencana yang diusulkan oleh BRICS untuk mengembangkan moda pembayaran alternatif berdasarkan mata uang lokal juga sangat menarik bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat (AS) dalam transaksi internasional.

BRICS telah berkembang menjadi forum strategis yang tidak hanya membahas isu ekonomi dan politik, tetapi juga ketenagakerjaan. BRICS memiliki potensi signifikan dalam membentuk kebijakan ketenagakerjaan global. Melalui pertemuan tahunan Menteri Ketenagakerjaan dan forum kerja lainnya, BRICS telah menekankan pentingnya pekerjaan yang layak, perlindungan sosial, dan dialog sosial sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan. Inisiatif ini menunjukkan komitmen BRICS dalam menciptakan standar ketenagakerjaan yang adil dan inklusif di tingkat global. Peran aktif BRICS ini memperkuat posisinya sebagai aktor penting dalam tata kelola ketenagakerjaan internasional.

Kerja sama antara BRICS dan *International Labor Organization* (ILO) telah meningkatkan dukungan kepada negara-negara anggota di bidang pekerjaan layak (*decent work*) dan perlindungan sosial. ILO menawarkan bantuan teknis dan saran kebijakan kepada BRICS untuk mengembangkan kebijakan ketenagakerjaan yang kuat. Misalnya, ILO membantu mengembangkan langkah-langkah yang secara efisien bertujuan untuk mengurangi pekerjaan informal dan meningkatkan akses ke jaminan sosial. Kemitraan ini mewakili multilateralisme untuk menangani masalah ketenagakerjaan yang kompleks dan beragam. Dengan demikian, BRICS memiliki kepentingan strategis dalam pembentukan standar ketenagakerjaan internasional. Oleh karena itu, studi lebih lanjut mengenai peran BRICS dalam tata kelola ketenagakerjaan global menjadi penting untuk memahami dinamika dan implikasinya bagi negara-negara berkembang lainnya.

Salah satu isu ketenagakerjaan adalah tren migrasi tenaga kerja yang juga bagian penting dari diplomasi internasional, strategi pembangunan, dan kebijakan global yang berkeadilan. Tren migrasi tenaga kerja semakin meningkat dan beragam akibat dinamika ekonomi global, geopolitik, dan perubahan kebijakan, baik di kawasan maupun global. Di satu sisi, migrasi tenaga kerja memberikan dampak positif terhadap perekonomian melalui remitansi (pengiriman uang), transfer keterampilan, dan penguatan konektivitas global. Di sisi lain, isu perlindungan hak pekerja migran, diskriminasi, serta ketidaksetaraan akses terhadap layanan sosial masih menjadi persoalan mendesak.

Keterlibatan Indonesia dalam BRICS membuka peluang strategis untuk memperkuat agenda ketenagakerjaan nasional melalui pembelajaran dan kerja sama antar negara anggota. Sebagai negara dengan jumlah angkatan kerja yang besar dan tantangan ketenagakerjaan yang kompleks, termasuk tingginya sektor informal, rendahnya produktivitas tenaga kerja, dan kesenjangan akses jaminan sosial, Indonesia dapat memanfaatkan BRICS untuk mendorong kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan. Partisipasi aktif dalam forum ketenagakerjaan BRICS memungkinkan Indonesia untuk mengakses praktik terbaik dari negara-negara seperti Brasil dan Tiongkok dalam memperluas cakupan perlindungan sosial serta meningkatkan kualitas pelatihan vokasi dan literasi digital.

Melalui penelitian ini, penulis akan menganalisis keanggotaan Indonesia dalam BRICS menggunakan tinjauan ekonomi politik migrasi yang signifikan terhadap pola migrasi tenaga kerja dan kebijakan proteksionisme tenaga kerja nasional. Kajian mengenai migrasi dan ketenagakerjaan dalam konteks keanggotaan Indonesia di BRICS membutuhkan pendekatan teoritis yang mampu menjelaskan secara komprehensif hubungan antara kepentingan ekonomi, kebijakan domestik, dan dinamika politik internasional. Untuk itu, pendekatan *Political Economy of Migration* yang dikembangkan oleh Geddes dan Scholten (2016) menjadi relevan digunakan dalam menganalisis isu ini. Teori ini berangkat dari pandangan bahwa migrasi bukan semata-mata hasil dari perbedaan upah atau kondisi ekonomi antarwilayah, sebagaimana dijelaskan dalam teori neoklasik, melainkan sebagai proses yang terbentuk dari interaksi kompleks antara aktor-aktor politik, kepentingan ekonomi, dan institusi yang beroperasi di berbagai tingkatan pemerintahan.

Penelitian tentang migrasi dan ketenagakerjaan dalam konteks Indonesia sebagai bagian dari BRICS memerlukan kerangka teoritis yang dapat menjelaskan kepentingan ekonomi serta kebijakan domestik dan dinamika politik internasional. Oleh karena itu, artikel ini

Analisis Strategis Keanggotaan Indonesia dalam BRICS terhadap Migrasi dan Proteksionisme Tenaga Kerja: Tinjauan Ekonomi Politik Migrasi

menggunakan pendekatan Ekonomi Politik Migrasi yang dikembangkan oleh Geddes dan Scholten, (2016) untuk menganalisis masalah ini. Teori ini didasarkan pada asumsi migrasi tidak hanya sebagai hasil dari perbedaan upah atau peluang ekonomi antara dua wilayah geografis seperti dalam teori neoklasik, tetapi sebagai dinamika yang dibentuk oleh berbagai proses dan aktor di berbagai tingkat pemerintahan dan di mana kepentingan sering dimobilisasi dan dimanfaatkan melalui formulasi kompetitif dan kolektif dari aktor-aktor politik, kepentingan ekonomi, dan institusi yang beroperasi di berbagai tingkatan pemerintahan.

Geddes dan Scholten (2016) menekankan bahwa tata kelola migrasi merupakan hasil tawar-menawar antara pelaku negara, pelaku pasar, dan tekanan serta klaim sosial politik dari masyarakat sipil. Dalam hal ini, negara tidak hanya bertindak sebagai regulator yang netral, tetapi sebagai aktor aktif yang menciptakan dan memimpin arus migrasi sesuai dengan kepentingan nasional, legitimasi politik, dan tekanan geopolitik internasional. Dalam latar belakang ini, keputusan negara untuk melindungi tenaga kerja domestik dengan tindakan proteksionis atau membuka pintu bagi pekerja migran merupakan fungsi dari perhitungan ekonomi politik yang sangat bergantung, termasuk juga dalam menentukan cara bereaksi terhadap dinamika forum kerja sama internasional, seperti BRICS.

Dalam konteks Indonesia, keanggotaan dalam BRICS dapat menjadi peluang untuk memperjuangkan standar ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap kondisi domestik, tetapi sekaligus dapat menimbulkan tekanan untuk membuka pasar tenaga kerja bagi negara anggota lain, termasuk Tiongkok dan India. Hal ini menempatkan pemerintah Indonesia dalam posisi strategis, tetapi juga dilematis, dalam menentukan arah kebijakan ketenagakerjaan nasional yang harus menyeimbangkan antara kepentingan diplomatik, perlindungan tenaga kerja lokal, dan kebutuhan pasar. Dengan demikian, pendekatan *Political Economy of Migration* memberikan kerangka analisis yang tepat untuk memahami bagaimana keanggotaan Indonesia dalam BRICS dapat mempengaruhi kebijakan migrasi dan proteksionisme tenaga kerja. Pendekatan ini tidak hanya melihat migrasi sebagai fenomena demografis atau ekonomi, tetapi sebagai proses politik yang melibatkan negosiasi kekuasaan dan kepentingan antar aktor domestik dan internasional.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menyajikan hasil penelitian yang lebih jelas dan pemahaman yang lebih mendalam. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, penulis menjabarkan dan menganalisis keanggotaan Indonesia dalam BRICS terhadap migrasi dan proteksionisme tenaga kerja. Data dikumpulkan melalui kajian literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, berita, laporan atau dokumen resmi (ILO, IOM, UN *South-South cooperation for development*, dan BPS) dan berbagai sumber ilmiah lainnya. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan analisis tematik untuk memberikan pandangan komprehensif dengan mengidentifikasi pola kebijakan, narasi dominan, serta potensi dampak langsung maupun tidak langsung dari keanggotaan BRICS terhadap tenaga kerja migran Indonesia, serta menawarkan rekomendasi strategis untuk memperkuat posisi dan proteksionisme tenaga kerja Indonesia dalam konteks kerja sama internasional BRICS.

Hasil dan Pembahasan

Peran BRICS dalam Kebijakan Ketenagakerjaan Global

Dalam lanskap tata kelola migrasi global yang selama ini didominasi oleh institusi Barat seperti OECD dan ILO, kehadiran BRICS menjadi alternatif forum bagi negara-negara berkembang untuk menyuarakan kepentingan mereka dalam kebijakan ketenagakerjaan. Melalui pendekatan *Political Economy of Migration*, keikutsertaan negara-negara BRICS dalam perumusan norma dan kebijakan ketenagakerjaan mencerminkan upaya untuk mendefinisikan ulang relasi kekuasaan dalam sistem migrasi global. BRICS Labour and

Employment Ministers' Meeting secara konsisten mendorong prinsip *Decent Work*, *Productive Employment*, dan perlindungan sosial sebagai agenda utama. Hal ini tampak dalam pertemuan tahun 2023 di Durban, Afrika Selatan, yang menekankan pentingnya pemulihan ketenagakerjaan pascapandemi COVID-19, serta penguatan perlindungan pekerja informal yang merupakan mayoritas angkatan kerja di negara-negara BRICS (*BRICS Labour and Employment Ministers' Meeting (LEMM)*, 2023).

Namun, seperti ditegaskan oleh Geddes dan Scholten (2016), kebijakan migrasi tidak hanya dibentuk oleh ide normatif, tetapi juga oleh kepentingan ekonomi-politik domestik. Dalam konteks BRICS, setiap negara anggota memiliki posisi ekonomi yang berbeda dan motif kebijakan ketenagakerjaan yang beragam. China dan India, misalnya, cenderung memosisikan diri sebagai eksportir tenaga kerja terampil dan penyedia jasa teknologi, sementara Afrika Selatan dan Brasil memiliki orientasi yang lebih proteksionis untuk melindungi pasar kerja domestik dari penetrasi asing. Perbedaan ini menghasilkan pendekatan yang tidak sepenuhnya harmonis dalam BRICS, tetapi justru mencerminkan bagaimana forum ini menjadi ruang tawar-menawar antara liberalisasi dan proteksionisme ketenagakerjaan. Hal ini selaras dengan argumen dalam *political economy of migration* bahwa kebijakan migrasi adalah hasil dari negosiasi politik domestik dan tekanan internasional, bukan sekadar produk rasional ekonomi (Geddes & Scholten, 2016; Ruhs & Martin, 2008).

Peran BRICS juga mulai membentuk arah baru dalam global labor governance melalui usulan pembentukan *BRICS Network of Labour Research Institutes* dan inisiatif digitalisasi pekerjaan yang inklusif. Dalam laporan McKinsey Global Institute (2023), potensi transformasi digital di negara-negara BRICS diproyeksikan mampu menciptakan 85 juta pekerjaan baru di sektor digital dan teknologi pada tahun 2030. Namun, peluang ini juga menuntut harmonisasi standar kerja dan mobilitas tenaga kerja di antara anggota BRICS. Jika tidak dikelola dengan baik, integrasi ini dapat menimbulkan ketimpangan antar negara anggota dalam hal akses tenaga kerja dan proteksi sosial. Oleh karena itu, Indonesia sebagai anggota baru BRICS menghadapi tantangan untuk memperkuat posisi tawarnya dalam memastikan bahwa norma ketenagakerjaan yang dirumuskan mencerminkan realitas negara berkembang, termasuk perlindungan terhadap pekerja migran, pengakuan atas sektor informal, serta kebijakan afirmatif bagi tenaga kerja perempuan dan muda.

BRICS menunjukkan keragaman dalam kebijakan ketenagakerjaan, yang mencerminkan konteks ekonomi, sosial, dan politik yang beragam. Namun, ada keinginan tertentu untuk mencapai tingkat yang serupa dengan standar internasional yang ditetapkan oleh ILO mengenai pekerjaan layak, perlindungan sosial, dan dialog sosial. Selain itu, dalam Deklarasi Bersama Pertemuan Menteri Perburuhan BRICS ke-11 di Brasil pada April 2025, negara-negara anggota berkomitmen pada kebijakan yang membantu memastikan transisi yang adil untuk mengurangi dampak kecerdasan buatan dan perubahan iklim pada pasar tenaga kerja, termasuk fokus pada perlindungan sosial dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Namun masih ada kendala, yakni tingginya tingkat pekerjaan informal yang mencapai 62,44 persen di BRICS pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun berkomitmen untuk mematuhi standar internasional, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural. Perspektif Ekonomi Politik Migrasi menekankan fakta bahwa kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya dibentuk oleh alasan ekonomi tetapi juga oleh dinamika kebijakan internal dan internasional, melalui konsep aktor negara dan bukan negara (Geddes & Scholten, 2016). Dalam konteks BRICS, perbedaan dalam sistem hukum dan tahap pembangunan ekonomi mempersulit negara untuk mengadopsi dan menerapkan standar ketenagakerjaan internasional.

Negara-negara BRICS memainkan peran sentral dalam mengatur pasar tenaga kerja mereka, dengan pendekatan yang bervariasi sesuai dengan konteks nasional masing-masing.

Analisis Strategis Keanggotaan Indonesia dalam BRICS terhadap Migrasi dan Proteksionisme Tenaga Kerja: Tinjauan Ekonomi Politik Migrasi

Misalnya, Tiongkok telah mengadopsi kebijakan yang mendorong kewirausahaan dan reformasi administratif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, Brasil, di bawah kepemimpinan presidensi BRICS 2025, menekankan pentingnya tata kelola kecerdasan buatan yang inklusif dan bertanggung jawab, serta perlindungan sosial adaptif untuk menghadapi perubahan di dunia kerja. Pendekatan ini mencerminkan bagaimana negara-negara BRICS berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan tenaga kerja, sesuai dengan prinsip-prinsip *Political Economy of Migration*.

Negara-negara BRICS memainkan peran sentral dalam pasar tenaga kerja utama, dan diterapkan dalam konteks nasional mereka. Misalnya di Tiongkok, strategi pembangunan fokus pada wirausahawan dan reformasi struktur administratif telah diterapkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Demikian pula, Brasil, dalam kepresidenannya BRICS 2025, memprioritaskan tata kelola AI yang inklusif dan bertanggung jawab serta perlindungan sosial adaptif untuk menanggapi transformasi di dunia kerja. Strategi-strategi ini menggambarkan bagaimana negara-negara BRICS berupaya untuk menyelaraskan persyaratan ekonomi dengan perlindungan tenaga kerja, sejalan dengan prinsip-prinsip Ekonomi Politik Migrasi.

Lebih jauh, negara-negara BRICS ingin meningkatkan kolaborasi dalam ketenagakerjaan melalui pertukaran pengalaman dan praktik yang baik. pembentukan BRICS *Social Protection Observatory* untuk mendorong berbagi pengalaman dan konvergensi kebijakan bagi anggota BRICS dalam perlindungan sosial. Pembentukan ini menunjukkan inisiatif negara-negara BRICS tidak hanya untuk menata pasar tenaga kerja mereka sendiri di dalam negeri, tetapi juga untuk membantu membentuk norma dan standar ketenagakerjaan di tingkat internasional.

Negara yang tergabung dalam BRICS saat ini menunjukkan pendekatan yang beragam dalam kebijakan ketenagakerjaan, mencerminkan dinamika antara proteksionisme dan liberalisasi. Misalnya, India mempertahankan tarif pertanian yang tinggi, dengan tarif rata-rata tertinggi di antara anggota BRICS, sebagai upaya melindungi sektor domestiknya. Sebaliknya, Tiongkok telah mengadopsi strategi liberalisasi ekonomi sejak reformasi Deng Xiaoping, meskipun tetap mempertahankan kontrol negara dalam sektor-sektor strategis. Dalam kerangka *Political Economy of Migration*, seperti dijelaskan oleh Geddes dan Scholten (2016), perbedaan ini menunjukkan bagaimana negara berperan aktif sebagai pengelola relasi antara tekanan pasar global dan legitimasi politik domestik. Kebijakan ketenagakerjaan tidak dapat dilepaskan dari logika kekuasaan dan posisi strategis negara dalam tatanan ekonomi global.

Persaingan ekonomi intra-BRICS memiliki kompleksitas regulasi ketenagakerjaan. Tiongkok memiliki keunggulan dalam bidang manufaktur dan teknologi, sedangkan India adalah *outsourcing* dan tenaga kerja digital. Di Brasil dan Afrika Selatan, pasar tenaga kerja lebih rapuh, pengangguran dan informalitas yang tinggi mendorong ke arah yang berlawanan. Bentuk regulasi ketenagakerjaan yang dikembangkan sebagai bagian dari persaingan ini secara langsung dikondisikan oleh kebutuhan negara-negara BRICS untuk tetap kompetitif secara internasional sehingga mereka tidak mengorbankan stabilitas sosial domestik. Perspektif ekonomi politik migrasi menunjukkan bahwa negara-negara ini dapat dilihat sebagai negara yang menyeimbangkan tuntutan liberalisasi pasar tenaga kerja dengan kebutuhan untuk menjaga stabilitas domestik dan legitimasi rezim (Geddes & Scholten, 2016).

Ekonomi Politik Migrasi juga menganalisis kebijakan migrasi dan ketenagakerjaan sebagai akibat dari konflik antara bisnis, lembaga negara, dan pelaku masyarakat sipil. Di Brasil, formalisasi sektor informal setidaknya sebagian merupakan respons terhadap lobi serikat pekerja dan tekanan dari bawah dari kelompok sosial yang menuntut akses ke perlindungan ketenagakerjaan. Sementara itu, Rusia menekankan kebijakan nasionalistik dan regulasi ketat migrasi tenaga kerja eksternal. Negara berfungsi bukan sebagai regulator tunggal tetapi

sebagai tempat di mana sejumlah pelaku ekonomi dan politik yang bersaing menyusun arah kebijakan migrasi dan ketenagakerjaan. Hal ini menegaskan argumen Geddes & Scholten bahwa dinamika kebijakan ketenagakerjaan merupakan hasil dari interaksi kekuasaan, dan tidak secara eksklusif ditentukan oleh logika pasar.

Secara keseluruhan, dinamika ekonomi politik dalam regulasi tenaga kerja BRICS menggambarkan keragaman strategi negara dalam merespons tantangan globalisasi tenaga kerja. BRICS tidak serta-merta menjadi blok yang mendorong liberalisasi ketenagakerjaan, tetapi lebih tepat dilihat sebagai forum di mana negara-negara berkembang mencoba mereformulasi norma ketenagakerjaan global sesuai dengan konteks domestik masing-masing. Dalam hal ini, forum BRICS memberi ruang bagi pembentukan kebijakan yang fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan nasional, namun tetap memperhatikan prinsip kerja layak dan keadilan sosial. Sejalan dengan pandangan Geddes & Scholten (2016), BRICS mencerminkan bagaimana kebijakan migrasi dan ketenagakerjaan merupakan produk dari persilangan antara tekanan eksternal global dan kalkulasi politik internal.

Peluang dan Tantangan Kebijakan Ketenagakerjaan Indonesia Pasca Bergabung dalam BRICS

Negara-negara BRICS memiliki peran beragam di migrasi global, yakni sebagai negara asal, transit, dan tujuan migrasi. Misalnya, Rusia adalah negara penerima imigran terbesar kedua di dunia, sementara India dan Tiongkok adalah negara pengirim migran terbesar. Meskipun memiliki perbedaan besar dalam struktur sosial ekonomi dan tujuan pembangunan, negara-negara BRICS menghadapi tantangan dan peluang migrasi yang serupa dan adanya kerja sama kebijakan bersama, khususnya dalam pengelolaan migrasi tenaga kerja terampil, pendidikan, dan transfer teknologi. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat posisi BRICS di kancah global, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada model dan dominasi Global North. Perkembangan pasar tenaga kerja dan ketenagakerjaan di negara-negara BRICS telah mendorong upaya serius untuk memastikan keberlanjutan pasar tenaga kerja mereka dengan fokus meningkatkan peluang kerja, mendorong kebijakan yang berpusat pada manusia serta inklusif berdasarkan pendekatan pekerjaan yang layak (*decent work*) (Korobkov, 2015).

Dalam kerangka *Political Economy of Migration* (Geddes & Scholten, 2016), kerja sama BRICS dalam isu ketenagakerjaan memungkinkan pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dalam mengatasi berbagai tantangan pasar tenaga kerja dan ketenagakerjaan. Kerja sama BRICS dalam isu ketenagakerjaan telah menjadi bagian integral dari kolaborasi antar negara anggota. Kerja sama ini sebagai upaya memperdalam pemahaman tentang berbagai karakteristik pasar tenaga kerja dan memperkuat aksi solidaritas negara-negara BRICS dalam bidang ketenagakerjaan baik di kawasan maupun global. Indonesia menghadapi tantangan kualitas pekerjaan mulai dari tingkat tenaga kerja sektor informal, ketidakcocokan keterampilan dengan kebutuhan pasar, hingga minimnya jaminan sosial menjadi hambatan dalam mewujudkan pekerjaan layak. Oleh karena itu, melalui keanggotaan dalam BRICS, dapat menjadi peluang strategis, *pertama* akses pasar kerja internasional. Sebagai aliansi negara-negara berkembang yang memiliki potensi ekonomi besar, BRICS membuka ruang bagi Indonesia untuk menjalin kerja sama ketenagakerjaan yang lebih luas, baik secara bilateral maupun multilateral. Negara-negara anggota BRICS memiliki kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu, seperti manufaktur, pertanian, teknologi informasi, dan jasa, yang dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia yang terampil.

Selain itu, kerja sama dalam BRICS juga mencakup pertukaran keterampilan dan pendidikan vokasi, di mana Indonesia berpeluang memperkuat kapasitas tenaga kerjanya melalui program pelatihan lintas negara. Partisipasi Indonesia dalam forum-forum BRICS kedepannya dapat menjadi upaya untuk memperkuat diplomasi ketenagakerjaan dengan membawa isu-isu penting seperti perlindungan pekerja migran dan mempromosikan pengakuan standar kerja yang layak secara global. Lebih lanjut, peluang ini memungkinkan Indonesia untuk mendiversifikasi tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang

Analisis Strategis Keanggotaan Indonesia dalam BRICS terhadap Migrasi dan Proteksionisme Tenaga Kerja: Tinjauan Ekonomi Politik Migrasi

selama ini masih terkonsentrasi di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah. Dengan memperluas cakupan ke negara-negara BRICS lainnya, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional dan menciptakan sistem migrasi kerja yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Sejalan dengan itu, negara-negara BRICS berpotensi meningkatkan investasi di Indonesia sehingga berdampak pada perluasan lapangan kerja baru. Investasi dari BRICS, misalnya di sektor infrastruktur, energi terbarukan, dan teknologi, dapat menyerap banyak tenaga kerja lokal dalam proyek-proyek besar. Hal tersebut akan mendorong peningkatan remitansi yang masuk ke Indonesia dari tenaga kerja luar negeri dalam bentuk mata uang asing. Remitansi ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung bagi rumah tangga penerima, tetapi juga dapat menjadi sumber pendanaan produktif jika dikelola dengan baik untuk pembangunan jangka panjang.

Meskipun demikian, sebagaimana yang dijelaskan oleh Geddes dan Scholten (2016) bahwa kebijakan migrasi dibentuk atas dasar kepentingan ekonomi-politik, salah satunya kebijakan proteksionisme di antara negara anggota BRICS dapat menjadi hambatan signifikan dalam memperluas mobilitas tenaga kerja lintas negara. Beberapa negara anggota menerapkan pembatasan terhadap masuknya tenaga kerja asing demi melindungi pasar kerja domestik, terutama dalam situasi ketidakstabilan ekonomi atau meningkatnya pengangguran lokal. Proteksionisme ini sering kali muncul dalam bentuk regulasi ketat, kuota, atau persyaratan keterampilan yang tinggi, yang pada akhirnya membatasi akses bagi pekerja dari negara mitra. Sebagai contoh, Tiongkok dan Rusia cenderung lebih protektif terhadap sektor kerja domestik mereka, sedangkan negara seperti Indonesia yang lebih dominan sebagai pengirim tenaga kerja memiliki kepentingan untuk memperluas akses bagi pekerjanya ke pasar internasional. Ketimpangan struktural antara negara pengirim dan penerima semakin memperkuat kendala ini, di mana negara penerima memiliki posisi tawar lebih besar dalam menentukan syarat dan perlakuan terhadap tenaga kerja asing. Ketimpangan kekuasaan ini berisiko menciptakan kerja sama yang tidak saling menguntungkan (Castles, 2010).

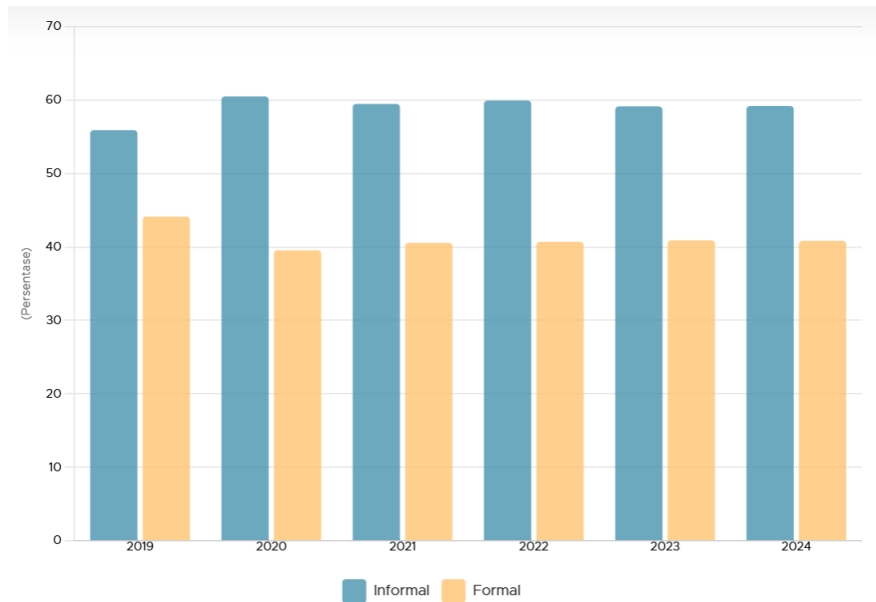
Kedua, terbentuk pasar tenaga kerja elit bersama. BRICS memiliki potensi dalam menciptakan pasar tenaga kerja elite BRICS sebagai alternatif dominasi Global North. Saat ini, negara-negara BRICS menghadapi tantangan yang sama terkait *brain drain* (migrasi tenaga terampil dan intelektual), baik melalui emigrasi pendidikan maupun aliran langsung profesional terlatih ke luar negeri. Kondisi ini menyebabkan kehilangan tenaga kerja berkualifikasi tinggi secara signifikan, serta kerugian finansial akibat hilangnya investasi negara dalam bentuk anggaran pendidikan. Namun Tiongkok dan India telah mengambil langkah-langkah untuk membina dan memulangkan diaspora intelektual (Korobkov, 2015). Melalui pendidikan dan mobilitas akademik dapat menjadi sektor strategis untuk kerja sama, misalnya pengakuan bersama ijazah, riset kolaboratif, dan kebijakan transfer teknologi yang dapat memperkuat kapabilitas sumber daya manusia dan inovasi di antara negara-negara anggota.

Di samping itu, pasar tenaga kerja BRICS menghadapi tantangan ketenagakerjaan informal yang semakin meningkat terutama pandemi COVID-19. Lalu, rendahnya partisipasi pekerja perempuan dalam pasar tenaga kerja masih menjadi isu krusial di sejumlah negara anggota. Dampak pandemi COVID-19 pun memperparah ketimpangan gender di pasar tenaga kerja, terutama terhadap pekerja perempuan, baik dalam aspek kehilangan pekerjaan maupun keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial. Oleh karena itu, partisipasi perempuan yang berkelanjutan dalam pekerjaan yang produktif, layak, dan menghasilkan pendapatan harus diakui sebagai prioritas utama dalam agenda kebijakan.

Dalam konteks Indonesia, pekerja informal diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu pelaku usaha informal mandiri dan pekerja upahan informal. Kelompok pertama mencakup individu yang menjalankan usaha sendiri di sektor informal, termasuk pengusaha kecil, pekerja keluarga yang tidak menerima upah, serta anggota koperasi produksi yang tidak

berbadan hukum. Sementara itu, pekerja upahan informal mencakup mereka yang bekerja tanpa ikatan kontrak resmi, tanpa jaminan ketenagakerjaan, maupun perlindungan sosial, baik di lingkungan kerja formal maupun informal (data.goodstats.id). Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dalam transisi menuju ekonomi formal. Meskipun terjadi peningkatan angka pekerja formal, pekerja informal masih mendominasi tenaga kerja. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, pada Februari tahun 2024, proporsi pekerja informal di Indonesia mencapai 59,17%, (84,13 juta), sedangkan pekerja formal sebesar 42,05%.

Proporsi Tenaga Kerja Formal dan Informal Indonesia



Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) yang diolah data.goodstats.id

Menurut BPS, angka pekerja informal di Indonesia terus bertambah dalam 5 tahun terakhir, terutama pasca pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), tahun 2019 terdapat 74,09 juta pekerja sektor informal atau setara dengan 57,27% dari total penduduk yang bekerja. Lalu, pada tahun 2020 jumlah pekerja informal tercatat paling banyak, yakni mencapai 60,47% dari total penduduk yang bekerja (data.goodstats.id). Sampai saat ini, Indonesia menghadapi tantangan informalitas yang sangat kompleks dipengaruhi oleh faktor struktural, kebijakan, dan pilihan rasional para pekerja. Oleh karena itu, perlu upaya yang berbasis data, sensitif terhadap konteks lokal, dan melibatkan reformasi kebijakan yang inklusif untuk mengatasi tantangan tersebut (Ablaza, Alladi, & Pape, 2023).

Ketiga, BRICS menawarkan ruang kerja sama pengembangan ekonomi digital global. Penggunaan platform digital memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, dan pengembangan usaha mikro dan kecil, serta dalam menyediakan peluang penghidupan bagi kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas. Ini menjadi peluang dan mengatasi tantangan yang muncul dari meningkatnya platform tenaga kerja digital, untuk memastikan pengembangan usaha yang berkelanjutan dan pekerjaan layak bagi semua, serta untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.

Meskipun platform ekonomi digital membuka peluang besar bagi pelaku usaha, masyarakat, dan pekerja, namun juga menimbulkan tantangan baru seperti ketidakpastian status kerja, minimnya perlindungan sosial, serta ketidakaturan dalam pendapatan dan jam kerja. Sama halnya dengan pekerja migran Indonesia yang masih sering menghadapi persoalan seperti pelanggaran hak, eksploitasi, hingga perlindungan hukum yang lemah.

Analisis Strategis Keanggotaan Indonesia dalam BRICS terhadap Migrasi dan Proteksionisme Tenaga Kerja: Tinjauan Ekonomi Politik Migrasi

Keempat, migrasi tenaga kerja sebagai *soft power*, artinya migrasi menjadi alat diplomasi dan pengaruh politik bagi negara-negara BRICS. Kerja sama BRICS dengan ILO telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara BRICS memiliki komitmen saling menghormati dan memahami, kesetaraan, solidaritas, keterbukaan, inklusivitas, dan konsensus. Sejak tahun 2024, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Indonesia telah bergabung sebagai anggota BRICS. Lima negara tambahan akan bergabung sebagai mitra, sehingga total menjadi 11 negara. Bagi ILO, hal ini merupakan peluang untuk memperluas kerja multilateral di seluruh kawasan, serta memperkuat hubungan dengan mitra-mitra baru yang sedang berkembang.

Lebih lanjut, Indonesia dapat memainkan peran sebagai jembatan antara BRICS dan negara-negara berkembang di kawasan ASEAN dalam memperjuangkan agenda ketenagakerjaan yang lebih inklusif. Dengan menempatkan isu-isu seperti pekerjaan layak bagi pemuda, perlindungan pekerja migran, dan kesetaraan gender dalam dialog BRICS, Indonesia tidak hanya memperkuat posisi nasionalnya, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan sistem ketenagakerjaan global yang lebih adil dan berorientasi pada pembangunan manusia.

Strategi Kebijakan Ketenagakerjaan Indonesia dan Proteksionisme melalui Keanggotaan BRICS

BRICS menjadi jaringan legal (*legal network*) multilateral yang potensial dalam isu migrasi tenaga kerja dan proteksionisme. Melalui aktivitas institusional yang berkaitan dengan peraturan ketenagakerjaan nasional dan kebijakan ketenagakerjaan yang disepakati menunjukkan bahwa isu ketenagakerjaan telah menjadi salah satu prioritas utama BRICS. Dalam berbagai pertemuan yang berkaitan dengan isu ketenagakerjaan, BRICS kerap mendeklarasikan tujuan bersama untuk menjadikan pasar tenaga kerja nasional negara anggotanya lebih produktif, fleksibel, dan terampil (Beltrame & Cappelletti, 2014). BRICS yang berbasis solidaritas Selatan-Selatan (*South-South cooperation*), kerja sama migrasi tenaga kerja antar negara anggota berpotensi menciptakan sistem yang lebih adil dan mendorong pembangunan negara-negara *Global South*.

Dalam konteks ini, meskipun kerja sama bilateral dan multilateral telah dilakukan oleh Indonesia termasuk menjadi bagian dari organisasi internasional seperti ILO dan IOM, langkah-langkah strategis harus dilakukan dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang untuk mendukung kebijakan ketenagakerjaan Indonesia, misalnya dalam penyediaan pelatihan vokasi, sertifikasi tenaga kerja, dan pengembangan sistem perlindungan sosial lintas negara, serta memperkuat posisi Indonesia dalam memperjuangkan standar global perlindungan tenaga kerja, termasuk mendorong terbentuknya sistem *mutual recognition* terhadap kemampuan tenaga kerja antar negara anggota. BRICS dapat menjadi forum untuk memperjuangkan kerangka hukum migrasi yang inklusif dan berkeadilan.

Lebih jauh, sebagaimana prinsip-prinsip *Political Economy of Migration*, melalui kerja sama pasar tenaga kerja yang inklusif dan menekankan pada proteksionisme global yang diiringi upaya melindungi pasar kerja domestik, regulasi atau kesepakatan kolektif mengenai mobilitas tenaga kerja menjadi penting. Melalui BRICS, Indonesia dapat mengupayakan diplomasi ketenagakerjaan yang proaktif untuk menghindari bentuk-bentuk diskriminasi atau eksklusif sehingga pekerja Indonesia mendapat perlakuan yang layak dalam skema kerja sama ekonomi BRICS. Keikutsertaan dalam BRICS harus dapat memperkuat daya tawar Indonesia dalam negosiasi ekonomi dan ketenagakerjaan. Melalui posisi diplomatik yang kuat, Indonesia tidak akan hanya menjadi penyedia atau eksportir tenaga kerja murah, melainkan mitra strategis dalam pertumbuhan ekonomi kolektif BRICS khususnya dalam isu ketenagakerjaan.

Untuk mendukung hal tersebut, regulasi ketenagakerjaan dalam BRICS juga harus diintegrasikan ke dalam kebijakan domestik agar lebih fleksibel dan kompetitif. Reformasi kebijakan migrasi perlu diarahkan untuk memperkuat sistem perlindungan, memperbaiki

tata kelola penempatan, serta memperkuat basis keterampilan tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing di pasar tenaga kerja BRICS. Regulasi ketenagakerjaan yang kaku sering kali dianggap sebagai hambatan bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks BRICS, Indonesia harus mencari keseimbangan antara fleksibilitas tenaga kerja dan perlindungan hak-hak pekerja. Jika regulasi terlalu ketat, Indonesia bisa kehilangan daya saing dalam menarik investasi. Sebaliknya, jika terlalu longgar, pekerja Indonesia berisiko menghadapi eksploitasi dengan kondisi kerja yang tidak layak. Oleh karena itu, reformasi regulasi ketenagakerjaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan tenaga kerja tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Contohnya, peningkatan investasi asing yang tidak diimbangi dengan regulasi ketat dapat menyebabkan eksploitasi tenaga kerja, seperti jam kerja yang berlebihan, kondisi kerja yang tidak layak, dan sistem kontrak yang merugikan pekerja. Jika Indonesia tidak berhati-hati, tenaga kerja lokal bisa terjebak dalam skema kerja yang kurang menguntungkan, baik dalam negeri maupun di negara anggota BRICS lainnya.

Selama ini, pemerintah Indonesia telah memiliki program kerja sama dengan ILO yakni *Decent Work Country Programme (DWCP)* yang memiliki tujuan untuk menciptakan pekerjaan yang layak. Program ini selaras dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya Goal 8 tentang pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Menurut ILO (2020), program ini memiliki tiga prioritas utama yakni dialog sosial yang efektif untuk bisnis berkelanjutan dan kesejahteraan pekerja, penciptaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan pemuda, serta perlindungan bagi kelompok pekerja rentan. Untuk mendukung hal tersebut, Indonesia dapat memperkuat kerja sama dalam hal regulasi tenaga kerja dengan negara-negara BRICS. Ini mencakup berbagi praktik terbaik dalam perlindungan hak-hak pekerja, pelatihan keterampilan, serta standar upah dan kondisi kerja yang layak. Kerja sama ini juga memungkinkan Indonesia untuk belajar dari pengalaman negara-negara BRICS dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan. Migrasi pendidikan dan kerja sama ilmiah menjadi area strategis. Misalnya penting untuk mengembangkan pengakuan bersama ijazah, proyek riset bersama, dan kebijakan transfer teknologi.

Hal ini sejalan dengan komitmen yang dideklarasikan pada LEMM BRICS yang dilaksanakan April 2025, yakni pendekatan yang berpusat pada manusia dalam menghadapi perkembangan AI, dengan memastikan bahwa kemajuan teknologi tetap sesuai dengan standar ketenagakerjaan ILO, menekankan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, serta mendorong pekerjaan yang layak (*decent work*). Selain itu, adanya transisi berkeadilan dengan mengakui peran penting negara-negara BRICS sebagai pemimpin dalam peralihan menuju pekerjaan ramah lingkungan (*green jobs*), sekaligus mencegah pengangguran dan memperkuat perlindungan sosial dan membentuk kebijakan inklusif, di mana pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha bekerja sama untuk meningkatkan kondisi kerja di negara-negara Global Selatan (ILO, 2025).

Kerja sama ketenagakerjaan BRICS dapat diperluas untuk mencakup isu-isu khas negara berkembang seperti dominasi sektor informal, perlindungan sosial yang belum merata, serta kebutuhan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Keikutsertaan Indonesia juga dapat mendorong pembentukan mekanisme bersama dalam pelatihan vokasi, pengembangan sistem jaminan sosial, serta mobilitas tenaga kerja terampil antarnegara anggota. Selain itu, Indonesia dapat berkontribusi dalam membentuk kebijakan bersama BRICS terkait perlindungan tenaga kerja migran, khususnya dalam konteks Asia Tenggara dan kawasan *Global South* yang lebih luas. Dengan memanfaatkan forum BRICS, Indonesia berkesempatan meneguhkan perannya sebagai penghubung antara Asia Tenggara dan blok negara-negara berkembang lainnya dalam membangun tata kelola ketenagakerjaan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan (Beletskaya, 2022).

Selanjutnya, meningkatkan transisi dari ekonomi informal ke formal sebagai sarana untuk meningkatkan kondisi hidup dan kerja, produktivitas, pertumbuhan lapangan kerja, serta memperkuat upaya pengurangan kemiskinan melalui akses ke pekerjaan yang layak dan perlindungan sosial. Berbagai pendekatan inovatif dan intervensi kebijakan yang telah

Analisis Strategis Keanggotaan Indonesia dalam BRICS terhadap Migrasi dan Proteksionisme Tenaga Kerja: Tinjauan Ekonomi Politik Migrasi

diterapkan BRICS bertujuan mengurangi ketidakformalan dan memfasilitasi transisi ke ekonomi formal. Melalui upaya dalam memperkuat kebijakan, regulasi memerlukan langkah-langkah untuk memfasilitasi transisi dari sektor informal ke sektor formal yang juga sesuai dengan standar ILO dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.

Ekonomi informal menjadi bagian penting dari ekonomi formal melalui hubungan seperti subkontrak dan rantai nilai. Para pekerja informal seperti wiraswasta, pekerja upahan, dan lain-lain masih belum sepenuhnya dijamin secara hukum dan menghadapi regulasi yang tidak memadai. Oleh karena itu, melalui kebijakan yang lebih inklusif dapat mengintegrasikan sektor informal ke dalam sistem ekonomi dan regulasi formal secara adil (Chen, 2005). Selain itu, penggunaan teknologi memiliki potensi tinggi untuk mempercepat transisi ke formalitas, misalnya menyediakan akses ke perlindungan sosial, menyederhanakan proses pendaftaran, memungkinkan pembayaran upah digital, meningkatkan akses ke pembiayaan, meningkatkan produktivitas, mendukung inspeksi ketenagakerjaan, dan kepatuhan hukum (BRICS, 2021).

Lalu, menciptakan kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial yang responsif gender untuk pemulihan jangka menengah dan panjang, termasuk kebijakan makroekonomi, kebijakan sektoral, dan kebijakan pasar tenaga kerja aktif juga sangat diperlukan. Indonesia juga dapat memainkan peran sebagai jembatan antara BRICS dan negara-negara berkembang di kawasan ASEAN dalam memperjuangkan agenda ketenagakerjaan yang lebih inklusif. Dengan menempatkan isu-isu seperti pekerjaan layak bagi pemuda, perlindungan pekerja migran, dan kesetaraan gender dalam dialog BRICS, Indonesia tidak hanya memperkuat posisi nasionalnya, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan sistem ketenagakerjaan global yang lebih adil dan berorientasi pada pembangunan manusia.

Melalui BRICS *Productivity Platform* yang diluncurkan bekerja sama dengan ILO, akan terus menjadi inisiatif utama untuk mendukung upaya-upaya tersebut yang akan memperkuat peran kerja sama internasional, khususnya kerja sama Selatan-Selatan dalam mewujudkan pasar tenaga kerja yang inklusif dan resilien. Indonesia bersama negara anggota BRICS lainnya harus mewujudkan komitmen berkelanjutan dalam memperkuat kerja sama di bidang ketenagakerjaan, perlindungan sosial, dan dialog sosial. Pengembangan pasar tenaga kerja dan ketenagakerjaan negara-negara BRICS bersifat multidimensi dengan fokus pada upaya kolektif yang membentuk masa depan dunia kerja dalam lanskap global yang terus berkembang, mulai dari membangun sistem kerja yang inklusif, adil, hingga adaptif terhadap transformasi digital dan krisis global, termasuk negara-negara BRICS mampu bersaing secara efektif dengan negara-negara lain dalam bidang ketenagakerjaan dan pasar tenaga kerja.

Kesimpulan

Indonesia sebagai anggota BRICS memberikan ruang yang strategis dalam ekonomi global, ketenagakerjaan, dan migrasi tenaga kerja. Namun dibalik itu, terdapat tantangan karena melibatkan serangkaian kebijakan kompleks yang perlu menyeimbangkan keterbukaan terhadap arus migrasi dan investasi serta menjaga kepentingan tenaga kerja domestik. Dengan menggunakan pendekatan Ekonomi Politik Migrasi milik Geddes dan Scholten (2016), hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan tidak dapat dipahami hanya melalui aspek ekonomi, tetapi dibentuk adanya negosiasi politik dan tekanan institusi serta kekuatan negara dalam konteks dinamika domestik dan global.

Dinamika internal BRICS mencerminkan keragaman dalam pendekatan ketenagakerjaan: sementara beberapa negara seperti Tiongkok dan India mendorong liberalisasi dalam sektor tenaga kerja dan mobilitas digital, negara lain seperti Brasil dan Afrika Selatan menunjukkan kecenderungan proteksionis demi stabilitas sosial. Perbedaan kepentingan ini menjadikan forum BRICS bukan sebagai instrumen harmonisasi kebijakan tenaga kerja yang seragam, melainkan sebagai arena strategis bagi negara-negara anggota untuk mempertahankan agenda nasional dalam koridor kerja sama multilateral. Dalam konteks Indonesia, forum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi tawar dalam isu proteksi pekerja migran,

peningkatan keterampilan tenaga kerja nasional, dan reformasi sistem migrasi internasional yang lebih adil bagi negara berkembang.

Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia dalam BRICS dapat dipahami sebagai bagian dari ekonomi-politik yang dirancang untuk melindungi kepentingan nasional dalam ketenagakerjaan di tengah tekanan liberalisasi global. Negara tetap menjadi aktor sentral dalam menavigasi tantangan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam pendekatan *Political Economy of Migration*, di mana keputusan kebijakan adalah hasil dari interaksi antara kepentingan ekonomi, tekanan domestik, dan tuntutan global. Dalam tahun-tahun mendatang, dengan segala ketidakpastian dan kemungkinannya, kinerja Indonesia sebagai anggota BRICS diharapkan sangat bergantung pada sejauh mana ia dapat merumuskan kebijakan migrasi dan ketenagakerjaannya, tidak hanya sebagai respons terhadap pasar global, tetapi juga sebagai respons terhadap kebutuhan sosial dan legitimasi politik di tingkat negara-bangsa.

Daftar Pustaka

- Aberth, W. A. V. P. (2024, Oktober 1). Proporsi pekerja informal Indonesia capai 59,17% di 2024. GoodStats. Diakses pada 1 Mei 2025 melalui <https://data.goodstats.id/statistic/proporsi-pekerja-informal-indonesia-capai-5917-di-2024-F1N9s>
- Ablaza, C., Alladi, V., & Pape, U. (2023). *Indonesia's Informal Economy: Measurement, Evidence, and a Research Agenda* (Policy Research Working Paper 10608). World Bank Group. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-10608>
- Ampri. (2024). "Indonesia's Interests and Challenges in Joining BRICS." *Mandub Journal*, 3(2), 194 - 206
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: BPS. diakses 2 Mei 2025 melalui <https://www.bps.go.id/id>
- Beletskaya, M. (2022). *BRICS Labor Markets: Competing with the Largest Economy*. *BRICS Journal of Economics*, 3(2), 75–96.
- Beltrame, L., & Cappelletti, M. (2014). *Recent labour policies in the BRICS countries: The case of China, India and Brazil*. University of Parma.
- BRICS Brasil. (2025). *Artificial intelligence and climate: BRICS declaration proposes policies to protect workers*. Diakses 1 Mei 2025. <https://www.ilo.org/about-ilo/ilo-and-brics>
- BRICS. (2021). *BRICS Labour and Employment Ministers' Declaration*. Ministry of Labour and Employment, Government of India.
- Castles, S. (2010). *Understanding global migration: A social transformation perspective*. *Journal of Ethnic and Migration Studies*.
- Chen, M. A. (2005). *Rethinking the informal economy: Linkages with the formal economy and the formal regulatory environment* (WIDER Research Paper No. 2005/10). United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER). <https://hdl.handle.net/10419/63329>
- Geddes, A., & Scholten, P. (2016). *The Politics of Migration and Immigration in Europe* (2nd ed.). London: SAGE Publications.
- Indonesia Joins BRICS: Unlocking New Economic Opportunities. Diakses 26 April 2025 melalui <https://www.aseanbriefing.com/news/indonesia-joins-brics-unlocking-new-economic-opportunities/>

Analisis Strategis Keanggotaan Indonesia dalam BRICS terhadap Migrasi dan Proteksionisme Tenaga Kerja: Tinjauan Ekonomi Politik Migrasi

- International Labour Organization (ILO). (2016). *BRICS ministerial meeting on Labour and Employment*.
- International Labour Organization (ILO). (2020). *Decent Work Country Programme (DWCP) for Indonesia 2020–2025*. ILO Indonesia and Timor-Leste Office. Retrieved from <https://www.ilo.org/jakarta>
- International Labour Organization. (2024). *Labour Market Policies in BRICS Countries: Challenges and Opportunities*. Geneva: ILO.
- Korobkov, A. V. (2015). *BRICS Members and the Migration Challenge*. *Tractus Aevorum*, 2(2), 190–203.
- McKinsey & Company. (2023). *The future of Asian consumption*. McKinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/featured%20insights/asia%20pacific/the%20trailblazing%20consumers%20in%20asia%20propelling%20growth/the-consumers-in-asia-trailblazing-new-paths-to-growth.pdf>
- Scholten, P., & Penninx, R. (2015). *The Multilevel Governance of Migration and Integration*. In B. Garcés-Mascareñas & R. Penninx (Eds.), *Integration Processes and Policies in Europe* (pp. 91–108). Springer.
- Thorstensen, V., & Oliveira, I. T. M. (2014). *BRICS in the WTO: Comparative Trade Policies*. BRICS Business Council.
- United Nations. (2016). *Framework of operational guidelines on United Nations support to South-South and triangular cooperation: Note by the Secretary-General (SSC/19/3)*. United Nations Digital Library. <https://digitallibrary.un.org/record/826679>
- Wardhana, Agastya, dan Radityo Dharmaputra. 2025. "What BRICS Membership Means for Indonesia's Foreign Policy." *The Diplomat*, 5 Januari. Diakses 26 April 2025. <https://thediplomat.com/2025/01/what-brics-membership-means-for-indonesias-foreign-policy/>